

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Angkasa, N. (2019). *Metode Penelitian Huum sebagai Suatu Penghantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. dan Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. UIN Sa Press.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Get Press Indonesia.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Harsono, B. (2014). *Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*. Djambatan.
- Harsono, B. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi,Tesis, serta Disertasi*. CV. Alfabeta.
- Laksana, I. G. N. D. (2016). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhammad Syahrums, S. and others. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Napitupulu, D. R. (2022). *Buku Materi Pembelajaran Hukum Pertanahan*. Jakarta: Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Rifa'i, I. jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (Issue May).

Sembiring, J. J. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: VisiMedia.

Soerso, R. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumardjono, M. S. W. (2007). *Hak Pengelolaan, Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya*. Mimbar Hukum.

Supriadi, (2023). *Hukum agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surata, I. G. (2016). *Landreform: reformasi hukum agraria bagi petani Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Syarief, E. (2014). Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. In *Kepustakaan Populer Gramedi*.

Urip Santoso, S. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.

Veda, R. M. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.

Waskito, H. A. (2019). *Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Yazid Fadhil. (2020). *Pengantar Hukum Agraria* . Medan: Undhar Press.

Artikel dalam Jurnal

Akbar, Suparman, E., & Rubiati, B. (2023). UNES Law Review. *UNES Law Review*, 6(2), 6739–6752.

Alfons, A., & Mujiburohman, D. A. (2021). Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 10, Issue 2).

Ayu Indirakirana, Komang Febrinayanti Dantes, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 414–430.

Aziziyah, A. N., & Tien Fitriyah, M. A. (2023). Tumpang Tindih Sertifikat

Tanah. *Legal Spirit*, 7(2), 205.

Chendiyosi, Y. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah*. 8(7), 311–315.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 486-494.

Dantes, febrinayanti komang. (2019). Jurnal 1Perlindungan Pailit. *Kedudukan Harta Kekayaan Debitor Yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit*, 1, 95–101.

Dwiyansany, S., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 226–236.

Febriana, N. T., & A, M. D. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181 / B / 2020 / Pt . Tun . Sby). *Jurnal Judiciary*, 11(1), 102–117.

Gayatri, N. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 79–83.

Hamenda, B. E., Mamahit, G. N., & Aling, D. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Disebabkan Oleh Penerbitan Sertifikat Yang Cacat Hukum. *Lex Administratum*, IX(3), 197–207.

Indah Sari. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15–33.

Kosanke, R. M. (2019). *Objek Sengketa Pertanahan*. 24.

Luvianti, T. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK / PDT / 2014)*. 6(2), 5076–5083.

Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 1–12.

Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 183–198.

Oeloem. (2015). *Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Negatif Bertendensi Positif*. 54.

- Parsaulian, A. P., & . S. (2019). Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 129.
- Pradipta, I. K. K., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2020). Peranan kantor pertanahan kabupaten karangasem terhadap sengketa pensertifikatakan tanah ditinjau berdasarkan UU No 5 Tahun 1960/undang-undang pokok agraria di Desa Adat Padangbai (studi kasus sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 220–229.
- Purbandari. (2021). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertnahan Nasional. *Yure Hemano*, 5(2), 32.
- Rajab, R. A., Eko Turisno, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Rampengan, S. (2023). Civilia : Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih (Overlapping) Antara Hak Atas Tanah Dengan Hak Milik Adat. *Civilia*, 2(4), 83–94.
- Suwondo, Denny and Saputra, I. (2019). Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Hukum*, 35(2), 186. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11053>
- Veda, R. M. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.
- Visual, P., Untuk, B., & Arsip, P. (2010). *Badan pertanahan nasional ri sekolah tinggi pertanahan nasional yogyakarta 2010*.
- Wismaya, M. Y., & Purwanto, I. W. N. (2019). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi. *E-Journal Unud*, 1–6.
- Yudiawan, I. D. G. H. (2021). *Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur. No 7 No 2*, 728.

Artikel Dalam Internet

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. <https://bpnbuleleng.id/profil-kantah>

Skripsi

Raflis, R. I. 2023. *PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 855 Atas Nama Sien Erli Sianti Dan Regina Simon)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Dian Sari, N. P. R. 2024. *AKIBAT HUKUM TERHADAP TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN BULELENG* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.